

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

IRMA YUNITA

A11116033



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan Diajukan Oleh

**IRMA YUNITA
A11116033**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

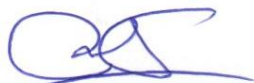
Disusun dan diajukan oleh

IRMA YUNITA
A11116033

telah dipertahankan dalam sidang skripsi

Makassar, 07 Maret 2023

Pembimbing I



Dr. Agussalim, SE., M, Si
NIP. 19670817 199103 1 006

Pembimbing II



Dr. Reno Fitrianti, SE., M, Si., CWM
NIP. 196770913 200212 2 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M. Si., CWM.®

NIP. 19740715 200212 1 300

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DI PROVINSI SULAWESI ARAT

Disusun dan diajukan oleh

IRMA YUNITA
A11116033

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 7 maret 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabata	Tanda Tangan
1.	Dr. Agussalim S.E., M.Si	Ketua	1..... 
2.	Dr. RetnoFitrianti S.E., M.Si., CWM	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Sultan Suhab S.E., M.Si	Anggota	3..... 
4.	Randi Kurniawan S.E., M.Sc	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM.®

NIP. 19740715 200212 1 300

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan diawah ini

Nama Mahasiswa : Irma Yunita
Nomor Pokok : A11116033
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 7 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Irma Yunita

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas berkat izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Taklupa pula salam dan shalawat penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. yang dengan segala keistimewaannya menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia di muka bumi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, sehingga dalam proses pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Ahmad dan Ibu Hindong yang telah memberikan kasih sayang selama ini sehingga saya dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Terimakasih karena telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, semangat dan doa selama penulisan skripsi ini hingga selesai. Mohon maaf sebesar-besarnya telah membuat papa dan mama menunggu lama.
2. Kakak Hadriana, Hasbi Waluyo, Wahida, dan adikku Wahidin, Mutmainnah yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. Keluarga besar Imam Mesjid Nurul Iman Taassala yang memberikan dukungan moril dan materiil selama masa perkuliahan.
3. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
4. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, CWM, CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

5. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
6. Sekretaris departemen ilmu ekonomi Universitas Hasanuddin Fitriwati Djam'an, SE., M.Si
7. Bapak Dr. Agussalim, SE., M.Si. dan Ibu Dr.Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM® selaku Pembimbing I dan Pembimbing II saya. Terima kasih banyak atas segala bantuan bimbingan, saran, dan waktu yang telah diberikan kepada saya selama menyusun skripsi ini. Penulis mohon maaf sedalam-dalamnya, apabila selama menjadi mahasiswa bimbingan, penulis tidak sengaja melakukan kesalahan berupa perilaku maupun lisan yang menyinggung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Bapak dan Ibu.
8. Bapak Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si dan Bapak Randi Kurniawan SE., M.Sc selaku Dosen Penguji. Terima kasih penulis ucapkan atas bimbingan dan saran yang diberikan kepada penulis untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
9. Segenap pegawai FEB Unhas, akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terima kasih telah membantu dalam pengurusan administrasi selama masa studi penulis. Khususnya pak Aspar yang sangat sagat baik dan sabar menghadapi penulis dan teman-teman penulis dalam pengurusan administrasi selama masa studi.
10. Teman-teman Ilmu Ekonomi angkatan 2016 "SPHERE" yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Teman-teman seangkatan yang telah berbagi suka maupun duka bersama penulis selama mengikuti perkuliahan dan yang telah senantiasa berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi ini.

11. KUWIT. Kasrina, Ummu, Winda dan Tina yang sudah menjadi teman perjuangan yang baik selama masa kuliah. Terima kasih atas Support dan bantuannya terutama calleda (Ummu) dan suami (Idam). yang selalu untuk canda tawanya.
12. Teman-teman yang menjadi teman berjuangku, Hanifa, Fera, Sulfitri, Tami, Dilla Lindo, Mulia yang selalu memberikan bantuan, dorongan dan semangat agar terselesainya penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih pada Kaimbang Ulu (Janu Wahab) yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi walaupun dalam hubungan jarak jauh.
- 14.** Teman-teman dari Komunitas Peduli Anak Yatim Dan Fakir Miskin, Relawan Pendidikan Indonesia, Kalam Langit, Utara Mengajar terimakasih yang sudah memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi. Akhir kata penulis menyadari masih banyak kesalahan baik isi maupun tata bahasa. Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu, kemampuan dan pengalaman penulis. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta dapat dijadikan sebagaisumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT *FACTORS THAT AFFECT UNEMPLOYMENT IN THE PROVINCE OF WEST SULAWESI*

Irma yunita
Agussalim
Retno Fitrianti
Ilmu Ekonomi, Universitas Hasanuddin
10 April 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat. variabel yang digunakan adalah variabel indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, dan produk domestik regional bruto. Adapun data yang digunakan yaitu data time series dan cross section tahun 2015-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan menggunakan jumlah pengangguran sebagai variabel dependen dan variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia, upah minimum provinsi, dan Produk domestik regional bruto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan dan variabel produk domestik regional bruto berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu jumlah pengangguran.

Kata Kunci: Jumlah pengangguran, IPM, Upah minimum, dan PDRB

This study aims to determine the factors that affect unemployment in West Sulawesi Province. The variable used is the human development index variable, the minimum wage of the province, and the gross regional domestic product. As for the data used, namely the time series data and cross section of 2015-2021 obtained from the West Sulawesi Province Statistics Center Agency. The method used is the panel data regression analysis method by using the number of unemployment as a dependent variable and an independent variable, namely the human development index, the minimum wage of the province, and the gross regional domestic product. The results of this study suggest that the human development index variable and minimum wage have no significant effect and the gross regional domestic product variable has a significant positive effect on the dependent variable, namely the number of unemployment.

Keywords: Number of unemployment, HDI, Minimum wage, and GDRP

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teoritis.....	10
2.1.1 Pengangguran.....	10
2.1.2 Penawaran Tenaga Kerja.....	13
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	15
2.1.4 Upah minimum	17
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	19
2.2 Hubungan antar variabel	21
2.2.1 Hubungan IPM dengan pengangguran.....	21
2.2.2 Hubungan UMP Dengan Pengangguran	23
2.2.3 Hubungan PDRB Dengan Pengangguran	27
2.2.4 Tinjauan Empiris.....	28
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian	30
2.4 Hipotesis	31

BAB III	METODE PENELITIAN	32
3.1	Lokasi Penelitian	32
3.2	Jenis dan Sumber Data	32
3.3	Metode Analisis Data	32
3.4	Model Estimasi Regresi Data Panel	34
3.5	Pengujian Hipotesis.....	36
3.5.1	Uji Statistik t.....	36
3.5.2	Uji Statistik F	36
3.5.3	Koefisien Determinan (R^2)	37
3.6.1	Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6	Definisi Operasional	40
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1	Gambaran Umum Penelitian	40
4.1.1	Geografis Sulawesi Barat.....	40
4.2	Perkembangan Hasil Penelitian	41
4.2.1	Perkembangan Jumlah Pengangguran di Sulawesi Barat tahun 2015-2021	41
4.2.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2021	42
4.2.3	Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2021	45
4.2.4	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto PDRB Di Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2015-2021	47
4.3	Hasil Regresi Analisis Data Panel	49
4.3.2	Uji Chow.....	49
4.3.3	Uji Lorange Multiplier.....	50
4.4	Hasil Regresi.....	51
4.4.1	Uji T.....	51
4.4.2	Uji Signifikan Simultan (Uji F)	53
4.4.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
4.5	Pembahasan.....	55
4.6.1	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran.....	55
4.5.1	Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran	57

4.5.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Pengangguran terbuka wilayah sulawesi Periode 2015-2021 .	3
1.2 Jumlah Pengangguran Sulawesi Barat Periode 2015-2021	4
4.1 Perkembangan jumlah pengangguran di Sulawesi Barat	42
4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi sulawesi Barat	43
4.3 Perkembangan Upah Minimum di Provinsi Sulawesi Barat	46
4.4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Barat	48
4.5 Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model	49
4.6 Hasil Uji Chow	50
4.7 Hasil Lagrange Multiplier	50
4.8 Hasil Uji t	52
4.9 Hasil Uji F	53
4.10 Hasil Uji R	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan hasil produksi ekonomi yang dilihat dari kemajuan teknologi. Proses peningkatan secara berkelanjutan dapat dilihat dari naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada di kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Pertumbuhan yang stabil dan diikuti dengan tren positif menunjukkan kondisi ekonomi makro yang ideal dan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, untuk peningkatan ekonomi disuatu negara dapat menerapkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi merupakan upaya perubahan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan wilayah, pengentasan kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro, 2003).

Dalam melakukan pembangunan di negara berkembang, pengangguran yang semakin bertambah dan tidak stabil merupakan masalah yang kurang menguntungkan terhadap perekonomian suatu negara. Keadaan di negara berkembang pada umumnya menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja untuk mengimbangi pengurangan

penduduk, sebenarnya target dari ekonomi pembangunan ekonomi adalah mengurangi dan memecahkan masalah yang terkait dengan pengangguran.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi memiliki potensi pasar yang cukup besar dilihat dari sisi input tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan pasar dari sudut permintaan melalui *multiplier effect* karena adanya *agregat demand* yang tinggi. Sebagai sumber tenaga kerja, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penggerak perekonomian dari sisi penawaran. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja akan mengakibatkan terjadinya masalah ketenagakerjaan seperti semakin tinggi angka pengangguran yang dapat meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas dan fenomena sosial ekonomi di masyarakat (Wahyuni, 2005).

Pengangguran merupakan suatu masalah yang cukup serius dihadapi oleh negara berkembang seperti Negara Indonesia. Menurut Alghofari, 2010 menyatakan bahwa pengangguran terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Peningkatan jumlah lapangan kerja dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah merupakan tujuan utama dalam setiap pembangunan ekonomi. Sedangkan lapangan pekerjaan yang lebih kecil dibanding angkatan kerja sehingga menyebabkan pengangguran. Pengangguran yang tinggi termasuk dalam masalah sosial ekonomi, jika masyarakat tidak menganggur dan memiliki penghasilan maka penghasilan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan mereka untuk hidup. Jika kebutuhan hidupnya telah terpenuhi dan

diharapkan tingkat pengangguran menjadi rendah (kesempatan kerja tinggi) (Mahihody, 2018).

Khususnya pada wilayah Kepulauan Sulawesi diketahui bahwa pengangguran di Sulawesi memiliki tingkatan seperti halnya Sulawesi Utara menduduki posisi pertama dan Sulawesi Barat berada di pengangguran terendah. Pengangguran di Kepulauan Sulawesi 2015-2021 dapat dilihat dari data Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sulawesi 2015-2021

Tahun	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Barat	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Gorontalo
2015	5.99	5.55	3.35	9.03	4.10	4.65
2016	5.50	2.72	3.20	6.18	3.29	2.76
2017	5.61	3.30	3.51	7.18	3.81	4.28
2018	5.34	3.26	3.16	6.86	3.37	4.03
2019	4.62	3.59	3.18	6.81	3.11	3.76
2020	6.31	4.58	3.32	7.37	3.77	4.28
2021	5.72	3.92	3.13	7.06	3.75	3.10

Sumber : *BPS Indonesia 2022*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat secara umum jumlah pengangguran dari tahun 2015-2021 di semua Provinsi yang ada di Kepulauan Sulawesi, pengangguran tertinggi berada di Sulawesi Utara dengan jumlah rata-rata sebanyak 5,51 persen, kemudian disusul oleh Sulawesi Selatan sebanyak 3,86 persen, Gorontalo sebanyak 2,78 persen, Sulawesi Tenggara sebanyak 2,63 persen, Sulawesi Tengah sebanyak 2,52 persen dan Sulawesi Barat sebanyak 2,34 persen. Dilihat dari rata-rata tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah rata-rata terendah di antara provinsi lainnya. di wilayah kepulauan Sulawesi selama sepuluh tahun terakhir.

Tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu masalah yang kompleks karena dapat dipengaruhi dan mempengaruhi oleh banyak faktor yang berinteraksi. Apabila pengangguran tersebut tidak segera

diatasi maka akan menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan ketimpangan baik bagi segi sosial maupun ekonomi. Besarnya angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan akibat dari pembangunan ekonomi. Berikut data jumlah pengangguran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2021:

Tabel 1.2 Jumlah Pengangguran di Sulawesi Barat 2015-2021

Tahun	Sulawesi Barat (jiwa)
2015	20,664
2016	20,219
2017	19.744
2018	20,227
2019	21,654
2020	23,132
2021	22,208

Sumber: BPS *Sulawesi Barat* 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan jumlah pengangguran yang ada di Sulawesi Barat selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 merupakan pengangguran tertinggi mencapai 23,132 jiwa karena dampak covid-19 sehingga banyak pekerja yang di PHK yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran sedangkan pengangguran terendah dari tahun sebelumnya berada di tahun 2017 dengan mencapai 19,744 jiwa.

Banyak faktor yang yang membuat jumlah pengangguran di Sulawesi Barat salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pengangguran adalah indeks pembangunan manusia. Kualitas manusia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun ketersediaan lapangan usaha yang masih minim dapat mengakibatkan banyak masyarakat yang menganggur. Indeks Pembangunan

Manusia merupakan salah satu indikator perekonomian yang mempengaruhi kestabilan pengangguran kita ketahui bahwa IPM menggunakan tiga dimensi penting dalam meningkatkan pembangunan, yakni berupa aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup sehat dan panjang usia, mendapatkan pengetahuan dan kemampuan memenuhi standar hidup yang layak (Muda, Koleangan, & Kalangi, 2019). Semakin baiknya tingkat kesehatan, pengetahuan dan penghidupan akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas dan kualitas kerja. Untuk itu banyak negara yang mengupayakan adanya peningkatan IPM agar dapat mengurangi pengangguran.

Dapat dilihat dari data indeks pembangunan manusia di wilayah Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan. Berikut data indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat.

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan manusia di Sulawesi Barat

Tahun	Majene	Polman	Mamasa	Mamuju	Pasangkayu	Mamuju Tengah
2015	64,40	60,87	63,17	65,09	64,69	62,22
2016	64,80	61,51	63,51	65,65	65,17	62,89
2017	65,40	62,35	63,92	66,32	65,67	63,64
2018	66,01	63,14	64,66	67,11	66,60	64,43
2019	66,59	63,74	65,32	67,72	67,27	65,10
2020	66,91	63,84	66,02	68,18	67,79	65,71
2021	67,29	64,23	66,63	68,37	68,03	66,18

Sumber: BPS Sulawesi Barat 2022

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dalam tujuh tahun terakhir indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2015 berada pada angka indeks terendah mencapai 60,87 indeks di kabupaten Polewali Mandar dan indeks tertinggi berada pada tahun 2021 mencapai angka 68,37 indeks kabupaten Mamuju.

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu faktor yang mendorong dalam menurunkan jumlah pengangguran, namun nyatanya

peningkatan indeks pembangunan manusia tidak diimbangi dengan menurunnya jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Selama tujuh tahun terakhir indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan, indeks pembangunan manusia di tahun 2015 mencapai 62,96 indeks dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 mencapai 66,36 indeks.

Selain Indeks Pembangunan Manusia faktor lain yang dapat menurunkan jumlah pengangguran adalah Upah Minimum. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit kerja berupa jumlah uang yang dibayarkan. Upah tenaga kerja sangat penting untuk kedua belah pihak. Bagi pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan seefisien mungkin. Bagi pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya, keluarganya dan menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya upah merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat (Panjawa, 2014).

Berikut data upah minimum Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015-2021

Tabel 1.3 Upah Minimum di Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Majene	Polman	Mamasa	Mamuju	Pasangkayu	Mamuju Tengah
2015	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500
2016	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
2017	2.017.780	2.017.780	2.017.780	2.017.780	2.017.780	2.017.780
2018	2.193.530	2.193.530	2.193.530	2.193.530	2.193.530	2.193.530
2019	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000
2020	2.701.651	2.701.651	2.701.651	2.701.651	2.701.651	2.701.651
2021	2.678.863	2.678.863	2.678.863	2.678.863	2.678.863	2.678.863

Sumber: BPS Sulawesi Barat 2022

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat upah minimum tujuh tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2015 upah minimum mencapai 1.655.500 rupiah dan upah minimum terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 mencapai 2.678.863 rupiah. Kebijakan upah minimum diterapkan atas pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

terutama kesejahteraan golongan masyarakat miskin. Peningkatan upah minimum diharapkan mampu meningkatkan pendapatan bagi pekerja yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Pamungkas Aji, 2017).

Faktor lain yang berpengaruh adalah PDRB di mana masalah pengangguran terjadi apabila jumlah dari penduduk setiap tahun mengalami peningkatan, maka hal ini akan menjadi tidak seimbang dalam dunia kerja karena jumlah penduduk yang ada tidak seimbang dengan dunia pekerjaan, sehingga akan berpengaruh pada GDP. GDP adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor produksi di suatu negara dan pertumbuhan ekonomi dengan GDP yang meningkat diharapkan akan menyerap tenaga kerja atau sebaliknya bila mana GDP mengalami penurunan berarti terdapat banyak pengangguran (Sari Madu Tengku, 2014). Berikut data PDRB di Sulawesi Barat tahun 2015-2021.

Tabel 1.4 PDRB di Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Majene	Polman	Mamasa	Mamuju	Pasangkayu	Mamuju Tengah
2015	2.822.89	7.255.66	1.762.18	6.475.19	6.104.85	1.812.80
2016	2.992.58	7.797.41	1.881.96	6.987.60	6.256.98	1.902.87
2017	3.180.58	8.330.45	1.995.43	7.470.71	6.655.78	2.005.78
2018	3.373.36	8.846.18	2.116.20	7.921.24	7.006.93	2.120.42
2019	3.572.16	9.390.94	2.240.36	8.335.09	7.315.09	2.230.79
2020	3.522.82	9.243.36	2.211.84	8.146.54	7.115.89	2.207.93
2021	3.598.96	9.414.99	2.255.61	8.342.02	7.389.30	2.282.75

Sumber: BPS Sulawesi Barat 2022

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat data PDRB tujuh tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, PDRB penyumbang terbesar di Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Polewali Mandar mencapai 7.255.66 milyar rupiah pada tahun 2015 hingga tahun 2021 mencapai 9.414.99 milyar rupiah, PDRB terendah berada pada Kabupaten Mamasa pada tahun 2015 mencapai 1.762.18 milyar rupiah, tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 2.255.61 milyar rupiah.

Produk domestik regional bruto menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di definisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah.

Menurut Amrullah, dkk (2019) apabila terjadi peningkatan PDRB berarti telah terjadi kenaikan produksi barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah naiknya permintaan tenaga kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran

Pengangguran yang merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk diteliti terutama di Sulawesi Barat, karena dampaknya dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan penyebabnya sangat berkaitan dengan beberapa indikator ekonomi. Adapun beberapa indikator yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum dan prroduk domestik regional bruto.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian yang diambil adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran di Sulawesi Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap pengangguran di Sulawesi Barat?
- 2) Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap pengangguran di Sulawesi Barat?
- 3) Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap pengangguran di Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pengangguran di Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui apakah upah minimum berpengaruh terhadap pengangguran di Sulawesi Barat.
3. Untuk mengetahui apakah produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap pengangguran di Sulawesi Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan institusi terkait, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dalam menyusun berbagai kebijakan untuk mendorong pemerintah dalam mengurangi pengangguran.
2. Bagi akademis penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian–penelitian lebih lanjut mengenai hal yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Kebanyakan orang kehilangan pekerjaan sehingga mengalami penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan politisi sering mengklaim, bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006).

Pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja namun giat mencari pekerjaan atau orang yang sedang dipanggil Kembali untuk bekerja di perusahaan. Dengan kata lain orang dikatakan menganggur apabila orang tidak bekerja, (Samuelson, 1992)

Teori klasik ini menjelaskan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Jadi dalam teori klasik tersebut jika terjadinya kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga kerja akan terus mengalami peningkatan karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibatnya keuntungan yang diperoleh menjadi rendah.

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994). Pengangguran

dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkis, 1999).

Dalam standar pengertian internasional, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang sangat sulit untuk diatasi. Kehilangan pekerjaan artinya menurunkan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2003).

Menurut Sukirno (2008) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Rubijanto (2012), pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup menciptakan lapangan

pekerjaan yang lebih banyak daripada penambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin serius.

Menurut Sadono Sukirno (1994) dalam Al Ghafari, 2011, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai (GDP) dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Pengangguran dibedakan atas tiga jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain: 1) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. 2) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian seperti kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan

produksi menurun dan pekerja diberhentikan. Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. 3) Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. 4) Pengangguran Siklis (*Cyclical Unemployment*) Pengangguran siklis adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksi. Dalam pelaksanaannya berarti jam kerja dikurangi, sebagian mesin produksi tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja diberhentikan.

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*), akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju (*developed countries*). Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001).

Dalam sensus penduduk 2011 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (BPS,2011:8).

2.1.2 Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu.

Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja, dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Masing-masing dari ketiga komponen dari jumlah jumlah tenaga kerja tersebut tergantung pada besar upah pasar (Bellante & Jackson, 1990).

Penawaran tenaga kerja sangat ditentukan oleh banyaknya penduduk di usia kerja yang memilih untuk menjadi angkatan kerja. Semakin banyak angkatan kerja maka penawaran tenaga kerja juga akan meningkat (Santoso, 2012).

Analisis penawaran tenaga kerja menganggap bahwa tidak ada perubahan jumlah populasi tenaga kerja maupun perubahan tingkat keterampilan. Untuk menganalisis dampak perubahan tingkat upah terhadap tenaga kerja yang ditawarkan dapat digunakan efek substitusi dan efek pendapatan. Melalui efek substitusi, perubahan upah menyebabkan perubahan pada *opportunity cost* waktu luang sehingga menghabiskan waktu luang menjadi lebih mahal yang pada akhirnya mengurangi waktu luang dan menambah jam kerja (Santoso, 2012)

Kurva penawaran tenaga kerja yaitu hubungan antara jam kerja dan tingkat upah. Misalkan seseorang akan memasuki pasar kerja jika upah yang ditawarkan melebihi dari upah reservasi (\hat{w}). Pada tingkat upah diatas upah reservasi, kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif sampai pada titik tertentu. Keadaan selanjutnya akan berubah jika kesejahteraan seseorang sudah baik atau mempunyai suatu keahlian yang lebih dan jumlah jam kerja yang ditawarkan semakin berkurang pada saat upah meningkat yang mengakibatkan slope kurva penawaran tenaga kerja menjadi negatif. Kurva ini disebut kurva penawaran tenaga kerja melengkung ke belakang (*backward bending labour supply curve*).

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu

tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. (Ine Indriastuti, 2013)

Sedangkan menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah jam yang digunakan pada kegiatan untuk menghasilkan sesuatu di perusahaan, pertanian, bisnis lain pemerintah, atau usaha nirlaba. Determinan utama penawaran tenaga kerja adalah jumlah penduduk dan cara penduduk menggunakan waktunya

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang (Saputra, 2011).

Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi untuk membangun manusia, yaitu: umur yang panjang, dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak (Bps, 2021).

Menurut Napitulu (2007), indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup layak. Semakin baik tingkat kesehatan tenaga kerja, pengetahuan yang tinggi dan memperoleh hidup yang layak, maka hasil kerja akan semakin bagus dan berkualitas, justru sebaliknya

semakin buruk keadaan tenaga kerja, maka hasil pekerjaannya akan semakin buruk pula atau tidak berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia yang siap untuk bekerja sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Indeks pembangunan manusia membahas penduduk pada suatu wilayah yang memiliki kesempatan memperoleh hasil pembangunan dari haknya untuk mendapatkan pendidikan, pendapatan, kesehatan. Selain itu IPM juga digunakan mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk dalam kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Hal tersebut menjadi tolak ukur mengetahui pengaruh kebijakan ekonomi pada suatu negara (sistina, 2017).

UNDP (*United Nations Development Programme*), memberikan pengertian bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dapat dipahami dari sudut manusianya bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu tolak ukur bagi suatu daerah untuk melihat seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia tersebut. Menurut pandangan *The United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai pilihan untuk manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan penghasilan serta pekerjaan. Pertumbuhan angka indeks pembangunan manusia yang semakin tinggi menggambarkan bahwa kualitas manusia semakin membaik. Pengangguran akan semakin berkurang apabila indeks pembangunan

manusia semakin meningkat, dari bidang pendidikan semakin tinggi seseorang meraih pendidikan maka tingkat pengangguran semakin menurun (Sistina, 2017).

Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia yaitu hal urgensi guna menilai kesuksesan pembangunan kualitas terhadap hidup manusia. Meningkatnya kondisi perekonomian hingga Indeks Pembangunan Manusia akan mengurangi persentase dari jumlah pengangguran sebab kualitas sumber daya manusia sebagai pekerja semakin baik dan permintaan terhadap tenaga kerja akan meningkat (Garnella dkk, 2020).

2.1.4 Upah minimum

Menurut Sadono Sukirno (2005) upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri dan keluarganya. Pengertian upah dalam teori ekonomi yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh para pengusaha kepada tenaga kerja.

Upah minimum Menurut David Ricardo upah pekerja tergantung kepada keperluan subsistensi, yaitu kebutuhan minimum yang diperlukan para pekerja

agar dapat bertahan hidup dan kebutuhan minimum tergantung pada lingkungan dan adat istiadat (Mahihody, 2018).

Teori Keynes beranggapan bahwa penurunan tingkat upah akan menurunkan daya beli masyarakat. Turunnya daya beli masyarakat akan menurunkan tingkat pengeluaran dan berakibat pada turunnya tingkat harga barang dan jasa. Turunnya tingkat permintaan terhadap barang dan jasa akibat lemahnya daya beli masyarakat akan berakibat pada penurunan kapasitas produksi yang artinya pengurangan jumlah tenaga kerja. Dengan demikian penurunan tingkat upah tidak dapat menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh (Full Employment).

Upah adalah sumber penghasilan, bila sumber penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan juga turun atau tetap dan itu juga pasti akan mempengaruhi tingkat kemiskinan . Upah yang diberikan nyatanya secara riil nilainya cukup rendah meskipun secara nominal angkanya cukup tinggi (Sistina, 2017).

Menurut Devanto dan Putu (2011), upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Imbalan tersebut dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Menurut Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 dikatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan

Upah minimum merupakan upah yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup tenaga kerja dan mencegah terjadinya eksploitasi tenaga kerja, dibayarkan kepada pekerja oleh pemberi kerja dalam bentuk upah bulanan. Upah minimum dapat mengurangi konsekuensi pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja seperti yang diprediksi oleh teori ekonomi konvensional (Kusaini, 1998).

Kebijakan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah berupaya untuk mensejahterakan tenaga kerja. Penetapan upah minimum juga memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk menyesuaikan perusahaan. Penetapan upah terdiri dari penetapan Upah Minimum Regional dan upah minimum provinsi. Upah Minimum Regional hanya berlaku ada daerah regional tersebut dan upah minimum provinsi berlaku untuk di seluruh wilayah kabupaten dan kota di provinsi tersebut (Sistina, 2017).

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tingkat Pertumbuhan PDRB merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi, yang dipakai untuk mengukur kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu (Poyoh Arfan, 2017).

Sedangkan menurut N. Gregory Mankiw, PDRB adalah pendapatan total dari produksi suatu barang atau jumlah dari upah dan laba dari proses produksi, dan juga merupakan pengeluaran total pada pembelian suatu barang. PDRB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu

Menurut Widodo (2006:78) Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (Value Added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Menurut Kuncoro (2015) Produk Domestik Regional Bruto adalah semua barang dan jasa akhir sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah yang bersangkutan, merupakan produk daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, banyak atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, income per kapita dan berbagai instrumen ekonomi lainnya (Rambe, 2019).

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah akan terus berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasarkan hasil kajian yang selektif terhadap situasi dan kondisi. Pembangunan yang merata dan dilaksanakan secara

tuntas perlu dijalankan, sehingga target pembangunan yang optimal akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini penting bagi daerah, karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, maupun sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

Menurut Rahardja (2008:239-240) Produk Domestik Regional Bruto terdiri atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung dengan melihat pada harga yang berlaku pada satu tahun yang ditetapkan sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi daerah. Sementara, PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara nyata atau riil dari tahun ke tahun struktur pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga dan inflasi.

2.2 Hubungan antar variabel

2.2.1 Hubungan IPM dengan pengangguran

Menurut (Mankiw, 2003) Modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. berdasarkan definisi Mankiw dapat disimpulkan bahwa modal bagi manusia dalam meningkatkan kualitas dirinya dalam dunia kerja adalah melalui program pendidikan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Maka dari itu modal di sektor pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga Indeks pembangunan manusia juga meningkat.

Hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran juga dijelaskan oleh Todaro (2000), bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang diukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah.

indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberi pendidikan yang baik serta pelatihan keterampilan dalam bekerja agar dapat meningkatkan perekonomian yang berkesinambungan. Dengan seperti itu jika suatu negara ingin membangun perekonomian yang berjangka panjang dan saling berkesinambungan maka sangat penting untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang akan meningkatkan kualitas SDM di suatu negara (Mukhtar dkk, 2019).

Teori pertumbuhan baru dalam (Dwi Mahroji, 2019) menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan manusia melalui pembangunan modal manusia (*human capital*) yang tercermin dalam tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran.

Menurut teori pertumbuhan baru menekankan bahwa pemerintah mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan *human capital* dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia (Anwar, 2017). Dengan demikian, diharapkan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan meningkatnya

pengetahuan dan keterampilan seseorang. Jadi, semakin tinggi kualitas manusia akan semakin meningkat pula pengetahuan dan keahliannya, sehingga akan mendorong meningkatnya produktivitas. Hal tersebut, akan membuat perusahaan memperoleh profit yang lebih tinggi, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang dapat terserap dan akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran.

Hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah seringkali cenderung hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Jika dari pembangunan ekonomi tersebut dihasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka dikatakan pembangunan ekonomi di negara atau daerah tersebut telah berhasil. Padahal dalam kenyataannya seringkali terjadi kondisi yang cukup kontradiktif, yaitu walaupun telah dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara atau daerah tetapi kondisi kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, sehingga sering dikatakan banyak ahli bahwa pertumbuhan ekonomi yang berhasil kurang berkualitas (Feriyanto, 2014:217).

2.2.2 Hubungan UMP Dengan Pengangguran

Tingkat upah yang tinggi yang diterima oleh tenaga kerja tergantung pada bentuk pasar tenaga kerja. Dalam situasi pasar persaingan sempurna, jika upah rendah banyak pekerja tidak akan bekerja. Sebaliknya, pasokan tenaga kerja akan meningkat jika upah yang ditawarkan tinggi. Upah minimum cenderung untuk meningkat setiap tahunnya seiring dengan kenaikan upah riil. Peningkatan upah minimum ini diharapkan mampu memicu penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran khususnya pengangguran terdidik. Pengangguran yang disebabkan kekakuan upah akibat penyesuaian antara jumlah pekerja yang menginginkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Namun yang terjadi hal ini meningkatnya tingkat upah membuat penawaran tenaga kerja bertambah, sehingga membuat permintaan tenaga kerja berkurang. Akibatnya terjadi surplus

tenaga kerja atau pengangguran. Penyebab kekakuan upah antara lain: peraturan upah minimum, serikat pekerja dan efisiensi upah (Mankiw, 2003).

Menurut Kaufman dan Hotchkiss dalam Alghofari (2011) penetapan tingkat upah yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu negara akan memberikan dampak terhadap besarnya tingkat pengangguran karena semakin tinggi besaran tingkat upah yang ditetapkan akan menurunkan jumlah orang yang bekerja pada suatu negara tersebut. Hubungan upah dan pengangguran juga dijelaskan dalam teori A.W. Phillips, dimana tingkat upah atau inflasi memiliki hubungan terbalik terhadap pengangguran.

Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran dijelaskan oleh Kaufman dan Hotchkiss (2000). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat upah minimum nya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawa tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi.

Kebijakan UMP, diterapkan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan meningkatnya upah minimum, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pekerja, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja ter eksploitasi, terutama yang

memiliki *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan dan menurunkan penawaran tenaga kerja (Mansur, dkk, 2014).

Menurut Samuelson (2001), peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditas yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran tenaga kerja akan berlekuk ke belakang (*backward bending curve*).

Penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi (Kaufman & Hotchkiss, 1999). Hal tersebut, dapat terjadi karena dengan semakin meningkatnya upah yang ditetapkan akan berpengaruh pada peningkatan penawaran tenaga kerja dan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Akibatnya, perusahaan akan melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaganya.

Menurut Kertonegoro (2000:54) ketentuan upah minimum adalah suatu ketentuan upah minimum yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan usulan atau masukan dari komisi pengupahan dan jaminan sosial dari dewan ketenagakerjaan daerah tentang keharusan perusahaan untuk membayarkan sekurang-kurangnya sejumlah upah kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya.

Menurut Mankiw (2003) teori upah adalah upah yang tinggi dapat mempertahankan tenaga kerja (karyawan) yang ingin keluar dan sektor usaha tidak akan menerima tenaga kerja yang baru dengan cepat tanpa keahlian dan pengalaman yang dimilikinya. Dengan upah yang tinggi perusahaan dapat meningkatkan kualitas rata-rata karyawan, apabila upah diturunkan maka para pekerja dapat berhenti dari perusahaan dan beralih kepada sektor usaha yang memberi intensif yang tinggi.

Menurut teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) dalam (Istifaiyah, 2015), menunjukkan bahwa upah yang banyak membentuk aktivitas makin menguntungkan. Teori upah efisiensi yang seringkali digunakan di negara-negara miskin berpendapat bahwa upah berpengaruh pada gizi. Para aktivis yang memberi menggunakan upah berkecukupan akan bertambah nutrisi, dan pekerja yang bertambah sehat akan bertambah menguntungkan. Teori efisiensi upah menunjukkan bahwa produktivitas pekerja semakin tinggi bersamaan menggunakan tingkat upah.

Sedangkan tingkat upah merupakan salah satu faktor tingkat pengangguran. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit kerja berupa jumlah uang yang dibayarkan. Upah tenaga kerja sangat penting untuk kedua belah pihak. Bagi pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan seefisien mungkin. Bagi pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya, keluarganya dan menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya upah merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat, (panjawa Lukis Jihad, 2014).

Hubungan Upah Minimum dengan pengangguran terjadi karena upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja. Hal tersebut memiliki hubungan antara seseorang untuk menganggur dalam

waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dan tentunya upah yang tinggi. Jika tenaga kerja menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima dan seluruh upah yang ditawarkan besarnya di bawah besaran upah maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut. Pada pihak pengusaha, penetapan upah minimum yang tinggi akan menyebabkan tingkat pengangguran yang bertambah. Hal ini dikarenakan perusahaan mengambil kebijakan efisiensi biaya produksi dengan mengurangi tenaga kerja. Besaran yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran yang dilakukan adalah dengan besaran upah rata-rata per Provinsi dalam satu tahun (Pitartono,2012)

2.2.3 Hubungan PDRB Dengan Pengangguran

Boserup (1999) berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk menyebabkan digunakannya sistem pertanian yang lebih intensif di suatu masyarakat dan meningkatnya output di sektor pertanian. Juga berpendapat bahwa penambahan penduduk berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, inovasi (teknologi) ada lebih dahulu. Inovasi itu hanya menguntungkan bila jumlah penduduk lebih banyak. Inovasi menurut Boserup dapat meningkatkan output pekerja, tetapi hanya dilakukan bila jumlah pekerja nya banyak. Pertumbuhan penduduk justru mendorong diterapkannya suatu inovasi (teknologi) baru (Mulyadi, 2003).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini penting bagi daerah, karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, maupun sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

Seorang ahli ekonomi Okun memperkenalkan Hukum Okun yang menyatakan bahwa terdapat kaitan yang erat antara tingkat pengangguran dengan GDP riil, di mana terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pengangguran

dengan GDP. Pada kurva Okun terdapat garis sumbu horizontal yang menunjukkan persentase GDP riil dan perubahan tingkat pengangguran pada sumbu vertikal. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat pengangguran tahun ke tahun sangat erat hubungannya dengan perubahan dalam GDP riil tahun ke tahun. Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pengangguran dalam suatu daerah, maka hal tersebut akan setara dengan terjadinya penurunan besarnya PDRB sebesar 2 persen. Apabila PDRB suatu daerah turun, maka produksinya juga turun, artinya tingkat produksi yang ada di daerah tersebut turun diakibatkan oleh konsumsi yang turun dari masyarakat dan juga tenaga kerja yang digunakan juga akan turun, akibat dari berkurangnya produksi perusahaan (Tupoho,2019).

Pertumbuhan angka indeks pembangunan manusia yang semakin tinggi menggambarkan bahwa kualitas manusia semakin membaik. Pengangguran akan semakin berkurang apabila indeks pembangunan manusia semakin meningkat, dari bidang pendidikan semakin tinggi seseorang meraih pendidikan maka tingkat pengangguran semakin menurun.

2.2.4 Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan Pengangguran. Penelitian dari Niken Anggita Pramastuti (2018), dalam penelitiannya berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Tengah dengan variabel bebas laju pertumbuhan PDRB, upah minimum dan inflasi. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2011 - 2015 dan cross section 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BPS. Penelitian ini menggunakan model Fixed Effect bahwa variabel

laju pertumbuhan PDRB dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sedangkan variabel inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan variabel laju pertumbuhan PDRB, upah minimum dan inflasi sama-sama berpengaruh terhadap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian dari Arfan Poyoh dkk (2017) tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara. Faktor-faktor tersebut termasuk upah, inflasi dan pertumbuhan PDRB. Analisis data menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dilakukan dengan menggunakan 14 tahun data dari tahun 2001 sampai 2014. Hasil penelitian menunjukkan variabel Upah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara dengan probabilitas 0.0104, sedangkan Inflasi dan Tingkat Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan masing-masing probabilitas 0.5619 (Inflasi) dan 0.3791 (Pertumbuhan PDRB).

Riza Firdhania (2017) dalam penelitiannya berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat pengangguran Di Kabupaten Jember”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk, inflasi, upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series yang diperoleh dari Disnaker Kabupaten Jember dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember tahun 2002-2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif statistik dan analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis

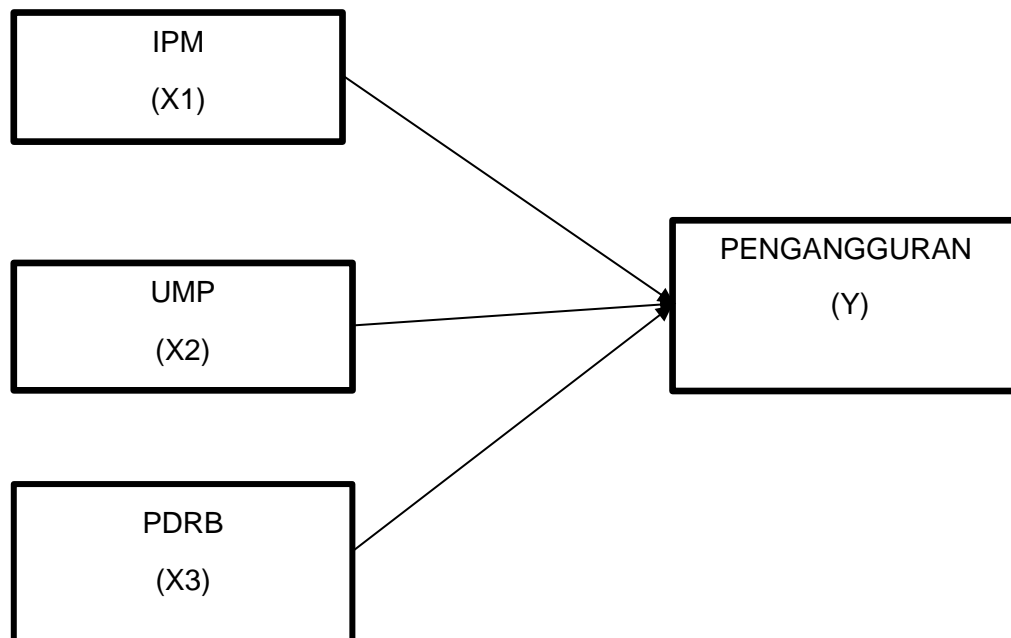
menggunakan pengujian parsial (uji t), simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R²). Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Variabel inflasi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jember.

Rhivna Cilviyani Rambe dkk (2019) dalam penelitiannya berjudul "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi". Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi; dan (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan data tahun 2000-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Rata-rata perkembangan pengangguran terbuka di Provinsi Jambi sebesar 0,53 persen; (2) Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB, upah minimum, inflasi, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran yaitu indeks pembangunan manusia upah minimum, dan produk domestik regional bruto (PDRB). Keempat variabel tersebut

yang akan diujikan dalam penelitian ini. Untuk lebih singkatnya bisa dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

1. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Sulawesi Barat
2. Diduga Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Sulawesi Barat
3. Diduga PDRB berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Sulawesi Barat